



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

LAPORAN PENILAIAN RISIKO

2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II PENILAIAN RISIKO	4
A. Penilaian Risiko	4
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	5
C. Hasil Analisis Risiko	10
D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan dan Celah dari pengendalian yang sudah ada	12
BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	15
BAB VI PENUTUP	17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Penilaian Risiko Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Penilaian Risiko OPD ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan, sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA PD Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Laporan Penilaian risiko OPD ini mencakup identifikasi terhadap Risiko Strategis Organisasi, Risiko Operasional Organisasi, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian. Laporan ini merupakan hasil dari Proses penilaian risiko strategis OPD yang dilaksanakan berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memuat pengaturan budaya sadar risiko, struktur pengelolaan risiko dan proses pengelolaan risiko.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Unit Pengelola Risiko (UPR) Tingkat OPD yang telah berkontribusi hingga dapat terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis OPD ini. Semoga laporan ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan/sasaran strategis bagi masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

Risiko merupakan Kemungkinan terjadinya peristiwa/kejadian yang dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Organisasi OPD juga memiliki kemungkinan terpapar oleh risiko, baik atas tujuan/sasaran strategis OPD, sasaran strategis perangkat daerah dan juga sasaran operasional perangkat daerah. Risiko-risiko tersebut harus dikelola agar OPD memiliki keyakinan yang memadai bahwa tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut perlu disusun kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan *aplicable*. Selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pengelolaan risiko menjadi budaya sadar risiko yang terintegrasi dalam setiap aktivitas pengambilan keputusan organisasi dari level tertinggi hingga yang terendah.

Pengelolaan risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semakin baik suatu organisasi mengelola risikonya, maka semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya dan tata kelola pemerintahan juga diharapkan semakin baik untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan risiko OPD adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh OPD, baik sasaran strategis OPD, sasaran strategis perangkat daerah, dan sasaran operasional perangkat daerah.

OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko-risiko

yang akan berdampak atau mengancam terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dan akan terus melaksanakan pengelolaan risiko yang meliputi pembangunan budaya risiko, sistem pengelolaan risiko dan proses pengelolaan risiko yang merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kebijakannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Proses pengelolaan risiko Strategis OPD yang dituangkan dalam Laporan penilaian Risiko ini, mencakup evaluasi efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi dan analisis risiko, dan respon (rencana tindak pengendalian) atas kelemahan Lingkungan Pengendalian dan penanganan risiko strategis OPD. Dengan dilakukannya proses dan penyusunan laporan penilaian risiko strategis OPD ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi OPD untuk melakukan perbaikan/ penyempurnaan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian dengan menindaklanjuti rencana tindak pengendalian yang buat sehingga tujuan dan sasaran strategis OPD dapat tercapai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.375/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan proses pengelolaan dan penilaian Risiko Strategis OPD adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan lingkungan pengendalian dan risiko-risiko-risiko strategis OPD sehingga dapat ditentukan upaya untuk perbaikan/penyempurnaan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian untuk peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian instansi pemerintah sehingga tujuan dan sasaran strategis OPD dapat tercapai.

D. Ruang Lingkup

Proses penilaian risiko strategis OPD meliputi:

1. Identifikasi risiko

Mencakup identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan berdampak terhadap tujuan strategis OPD, serta kelengkapan atribut risiko strategis OPD lainnya, seperti kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, , sumber risiko, dan penerima dampak risiko.

2. Analisis risiko

Mencakup pemberian skor tingkat kemungkinan, tingkat dampak dan tingkat/level risiko, mengevaluasi pengendalian yang ada, memvalidasi risiko, dan menyusun dan menyelaraskan rencana tindak pengendalian untuk perbaikan lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian, beserta rencana informasi dan komunikasi serta pemantauannya.

BAB II

PENILAIAN RISIKO

A. Penilaian Risiko

1. Kriteria Penilaian Risiko

Skala penilaian risiko yang digunakan dalam penilaian risiko strategis OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Skala Dampak

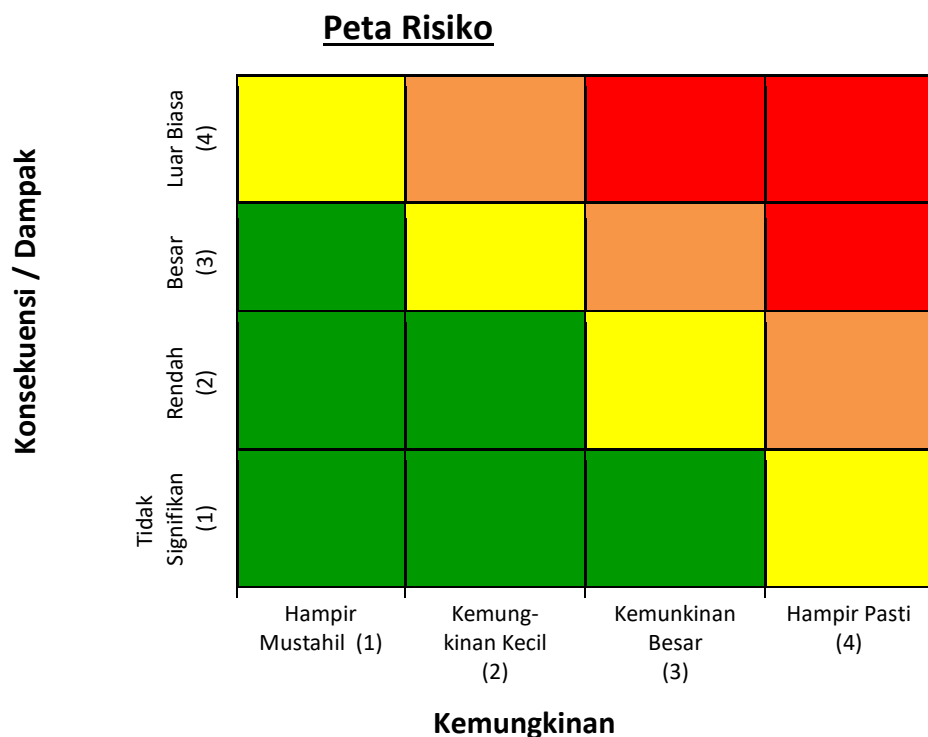
Rating	Kategori	Deskripsi
4	Luar Biasa	Mengancam Organisasi secara keseluruhan
3	Besar	Mengancam sebagian program
2	Rendah	Mengganggu sebagian kegiatan
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi

b. Skala Kemungkinan

Rating	Kategori	Deskripsi
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
2	Kemungkinan Kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

c. Skala Penerimaan Nilai Risiko

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan



B. Hasil Identifikasi Risiko

Daftar risiko OPD berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan pada risiko Strategis OPD (Program) dan risiko Operasional OPD (sub kegiatan), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Strategis OPD (RSO)

No.	Program	Indikator Kinerja Utama	Risiko	Kode Risiko
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector kelautan dan perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan sub kategori perikanan mengalami penurunan atau perlambatan	RSO.22.2 5.27.01
		Nilai Tukar Nelayan	Indeks yang diterima nelayan lebih rendah dibanding indeks yang dibayarkan atau penurunan NTN	RSO.22.2 5.27.02

		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Indeks yang diterima pembudidaya ikan lebih rendah dibanding yang dibayarkan atau penurunan NTPi	RSO.22.2 5.27.03
1.1.a	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	Penurunan jumlah produksi perikanan dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.04
1.1.b	Meningkatnya konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	Penurunan Angka Konsumsi Ikan dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.05
1.1.c	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha hasil perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Penurunan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.06
1.1.d	Meningkatnya Kawasan pemanfaatan ruang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Penurunan tingkat luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.07
1.1.1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Gagal produksi	RSO.22.2 5.27.08
			Produksi Perikanan Budidaya Menurun	RSO.22.2 5.27.09
1.1.2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Menurunnya Produksi Perikanan Tangkap	RSO.22.2 5.27.10
1.1.3	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah ragam produk hasil perikanan dan pemasarannya	Unit Pengolahan Ikan belum berkembang dengan baik dan Pemasaran Produk yang tidak merata	RSO.22.2 5.27.11
1.1.4	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Makin maraknya tindak pidana Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (Penangkapan Ikan Illegal) dan Destructive Fishing	RSO.22.2 5.27.12
1.1.5	Program	Persentase luasan	Konflik pemanfaatan	RSO.22.2

	pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil	pengelolaan ruang laut yang dikelola	zonasi ruang laut	5.27.13
--	--	--------------------------------------	-------------------	---------

2. Identifikasi Risiko Operasional OPD (ROO)

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Risiko	Kode Risiko
1.1.1 .1.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya di Laut	Perencanaan: Adanya ketidaktepatan jumlah bantuan yang diberikan	ROO.22.03.25.01
			Pelaksanaan: Tingkat kematian benih ikan yang tinggi selama proses pengiriman	ROO.22.03.25.02
1.1.1 .1.2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Budidaya Ikan di Air Payau	Perencanaan: Adanya kesalahan dalam menentukan penerima bantuan	ROO.22.03.25.03
			Pelaksanaan: Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan output yang dicapai	ROO.22.03.25.04
1.1.1 .1.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana Pembinaan dan Pemantauan Budidaya Ikan	Perencanaan: Kesalahan dalam menentukan output kegiatan	ROO.22.03.25.05
			Pelaksanaan: Capaian kualitas pekerjaan tidak sesuai target yang diharapkan	ROO.22.03.25.06
1.1.1 .1.4	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan	Jumlah Balai Benih Budidaya Air Payau dan Laut	Perencanaan: Tidak dianggarkannya kegiatan untuk perencanaan dan	ROO.22.03.25.07

	Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi		pembangunan pagar keliling serta kesalahan dalam penganggaran biaya dalam sertifikasi Lahan BBU	
			Pelaksanaan: Capaian kualitas pekerjaan tidak sesuai target yang diharapkan	ROO.22.03.25.08
1.1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan yang menerima hibah	Perencanaan: Adanya calon penerima bantuan yang belum tervalidasi	ROO.22.03.25.09
.1.1			Pelaksanaan: Keterlambatan penyaluran bantuan	ROO.22.03.25.10
			Pelaksanaan: Penerima hibah tidak membelanjakan bantuan hibah (uang) sesuai dengan RAB	ROO.22.03.25.11
1.1.2	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Kajian Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Perencanaan: Dokumen Kerangka Acuan Kerja tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undangan terkait	ROO.22.03.25.12
.2.1			Pelaksanaan: Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan	ROO.22.03.25.13
1.2.1	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan	Jumlah Sarana Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Perencanaan: Hanya bisa melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap beberapa UPI saja (tidak bisa semua UPI)	ROO.22.03.25.14
.1.1			Pelaksanaan: Memerlukan waktu	ROO.22.03.25.15

	Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing		yang lama untuk mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan	
1.3.1 .1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Hari Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Perencanaan: Terlambatnya kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	ROO.22.03.25.16
			Pelaksanaan: Target pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak tercapai	ROO.22.03.25.17
			Pelaksanaan: Keselamatan petugas pengawasan terancam (kemungkinan terjatuh, terpeleset, terbentur, tabrakan, terbakar, meledak, dan terjebak di ruang pendingin atau Cold Storage)	ROO.22.03.25.18
1.4.1 .1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kajian Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir	Perencanaan: Kesalahan dalam penentuan tahapan atau proses kajian materi teknis	ROO.22.03.25.19
			Pelaksanaan: Capaian kualitas pekerjaan tidak sesuai target yang diharapkan	ROO.22.03.25.20
1.4.1 .1.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah	Jumlah Kajian Pencadangan Kawasan Konservasi Pulau Cermin dan Perairan Sekitarnya	Perencanaan: Kesalahan dalam penentuan tahapan atau proses Kajian FS	ROO.22.03.25.21

	Pusat			
			Pelaksanaan: Capaian kualitas pekerjaan tidak sesuai target yang diharapkan	ROO.22.03.25.22
1.4.1 .2.1	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Prasarana masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perencanaan: Kurangnya kelengkapan dokumen administrasi mekanisme bantuan hibah	ROO.22.03.25.23
			Pelaksanaan: Capaian kualitas pekerjaan tidak sesuai target yang diharapkan	ROO.22.03.25.24

C. Hasil Analisis Risiko

Hasil analisis risiko yang dilakukan melalui FGD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Risiko Strategis OPD (RSO)

No.	Risiko	Kode Risiko	Tingkat Dampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Risiko
1	Indeks yang diterima nelayan lebih rendah dibanding indeks yang dibayarkan atau penurunan NTN	RSO.22.2 5.27.02	2'80	3'10	8'68
2	Penurunan jumlah produksi perikanan dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.04	2'63	2'50	6'56
3	Penurunan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.06	2'40	2'80	6'72
4	Penurunan tingkat luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.07	2'88	3'38	9'70
5	Menurunnya Produksi Perikanan Tangkap	RSO.22.2 5.27.10	3'00	3'40	10'20
6	Unit Pengolahan Ikan belum berkembang	RSO.22.2 5.27.11	2'60	2'80	7'28

	dengan baik dan Pemasaran Produk yang tidak merata				
7	Makin maraknya tindak pidana Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (Penangkapan Ikan Illegal) dan Destructive Fishing	RSO.22.2 5.27.12	2'60	2'60	6'76

2. Risiko Operasional OPD (ROO)

No.	Risiko	Kode Risiko	Tingkat Dampak	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Risiko
1	Adanya calon penerima bantuan yang belum tervalidasi	ROO.22.0 3.25.09	2'80	2'80	7'84
2	Keterlambatan penyaluran bantuan	ROO.22.0 3.25.10	2'80	2'80	7'84
3	Penerima hibah tidak membelanjakan bantuan hibah (uang) sesuai dengan RAB	ROO.22.0 3.25.11	2'80	2'60	7'28
4	Dokumen Kerangka Acuan Kerja tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undangan terkait	ROO.22.0 3.25.12	2'80	2'80	7'84
5	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan	ROO.22.0 3.25.13	2'60	2'80	7'28
6	Hanya bisa melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap beberapa UPI saja (tidak bisa semua UPI)	ROO.22.0 3.25.14	2'20	3'20	7'04
7	Target pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak tercapai	ROO.22.0 3.25.17	2'40	2'60	6'24

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan dan Celah dari pengendalian yang sudah ada

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian yang sudah ada dan efektivitasnya, dapat diuraikan rencana tindak pengendalian yang masih dibutuhkan atas risiko prioritas, sebagai berikut:

1. Risiko Strategis OPD (RSO)

No.	Risiko	Kode Risiko	Pengendalian yang sudah dilakukan	Celah Pengendalian
1	Indeks yang diterima nelayan lebih rendah dibanding indeks yang dibayarkan atau penurunan NTN	RSO.22.2 5.27.02	- Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah - Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap	- Peran Tim TPID perlu ditingkatkan - Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap perlu ditingkatkan
2	Penurunan jumlah produksi perikanan dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.04	- Percontohan pembudidaya ikan di laut - Pengadaan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan perlu ditingkatkan
3	Penurunan Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.06	- Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil - Pembangunan pos pengawasan - Pemasangan papan informasi terkait larangan destructive fishing - Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	- Pengawasan rutin sumberdaya Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan - Perlu peningkatan penumbuhan kelompok masyarakat pengawasan SDKP
4	Penurunan tingkat luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mencapai target	RSO.22.2 5.27.07	- Sosialisasi pengelolaan zonasi Kawasan Konservasi Perairan - Pelatihan terumbu karang buatan	- Perlu peningkatan pengelolaan zonasi wilayah perairan - Perlu peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 Mil
5	Menurunnya Produksi Perikanan Tangkap	RSO.22.2 5.27.10	- Pengadaan bantuan sarana prasarana mesin tempel 15 PK	- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap perlu

			<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana prasarana berupa tambatan perahu nelayan di Desa Salimbatu dan Desa Ardi Mulyo - Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 	ditingkatkan
6	Unit Pengolahan Ikan belum berkembang dengan baik dan Pemasaran Produk yang tidak merata	RSO.22.2 5.27.11	<ul style="list-style-type: none"> -Kajian Penyusunan Master Plan/ Blue Print Perikanan Kaltara -Monitoring dan evaluasi rutin oleh Dinas ke UPI 	-Belum semua UPI bisa diakomodir untuk pembinaannya karena keterbatasan anggaran
7	Makin maraknya tindak pidana Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (Penangkapan Ikan Illegal) dan Destructive Fishing	RSO.22.2 5.27.12	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Pos Pengawasan - Pembentukan kelompok masyarakat pengawas ' Perlengkapan POKMASWAS 	- Kegiatan pengawasan perlu ditingkatkan

2. Risiko Operasional OPD (ROO)

No.	Risiko	Kode Risiko	Pengendalian yang sudah dilakukan	Celah Pengendalian
1	Adanya calon penerima bantuan yang belum tervalidasi	ROO.22.0 3.25.09	- Terdapat SOP/ Petunjuk Teknis pengajuan proposal Bantuan	- Masih terdapat kemungkinan kesalahan dari pihak internal dinas dalam pemberian bantuan (pemeriksa barang, dll)
2	Keterlambatan penyaluran bantuan	ROO.22.0 3.25.10	- Terdapat SOP/ Petunjuk Teknis pengajuan proposal Bantuan	- Masih terdapat kemungkinan kesalahan dari pihak internal dinas dalam pemberian bantuan (pemeriksa barang, dll)
3	Penerima hibah tidak membelanjakan bantuan hibah (uang) sesuai dengan RAB	ROO.22.0 3.25.11	- Terdapat SOP/ Petunjuk Teknis pengajuan proposal Bantuan	- Ego internal dari kelompok penerima hibah
4	Dokumen Kerangka Acuan Kerja tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undangan	ROO.22.0 3.25.12	- Mempelajari secara rinci peraturan perundangan terkait untuk meminimalisir terjadinya kesalahan	- Terkadang masih terdapat kesalahan dalam melakukan pekerjaan/ kurangnya pemahaman

	terkait			
5	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan	ROO.22.0 3.25.13	Monitoring berkala dan koordinasi dengan pejabat pengawas pekerjaan	- Masih terdapat konflik penggunaan lahan
6	Hanya bisa melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap beberapa UPI saja (tidak bisa semua UPI)	ROO.22.0 3.25.14	Melakukan pembinaan dengan menggunakan media online	- Keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada UPI
7	Target pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak tercapai	ROO.22.0 3.25.17	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	Terbatasnya personil pengawasan SDKP

BAB III

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Rencana Tindak Pengendalian untuk memastikan risiko yang telah disusun untuk dilakukan pengendalian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko tersebut, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaannya untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan dengan efektif.

Rancangan pemantauan yang disusun berdasarkan hasil FGD UPR tingkat OPD, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Risiko Strategis OPD (RSO)

No.	Perbaikan Pengendalian	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan
1	Bantuan hibah uang untuk nelayan	dokumentasi kegiatan dan SK Penerima Hibah
2	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan hibah uang - Sosialisasi Pelabuhan dan FS pembangunan Pelabuhan perikanan - Hibah benih ikan bandeng, udang windu, rumput laut kultur jaringan 	dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan dan SK Penerima Hibah
3	- KEGIATAN Pengawasan laut dan rapat koordinasi dan konsultasi ke pusat	Konfirmasi persiapan, dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan
4	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian pengintegrasian teknis pengaturan ruang perairan pesisir ke dalam RTRW dan penyusunan dokumen perubahan materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir - Kajian study kelayakan FS pencadangan kawasan konservasi pulau cermin dan perairan sekitarnya 	Konfirmasi persiapan dan pelaksanaan kajian
5	- Sosialisasi Pelabuhan dan Penyusunan study kelayakan FS Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir sosialisasi
6	- Monitoring dan evaluasi rutin secara berkala oleh Dinas ke UPI	Laporan monitoring dan evaluasi ke UPI-UPI
7	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih banyak melakukan pengawasan tidak hanya di laut saja (sungai, pasar, dll) - Menambah personil pengawasan 	Surat tugas pengawasan

2. Risiko Operasional OPD (ROO)

No.	Perbaikan Pengendalian	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan
1	- Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi
2	- Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi
3	- Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi
4	- Konsultasi dengan Instansi vertikal (KKP) untuk perencanaan pembangunan perikanan - Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan fisik yang diberikan secara berkala	Laporan monitoring dan evaluasi
5	Clearing lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan perikanan yaitu dengan koordinasi dengan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan	Dokumentasi kegiatan dan laporan hasil kegiatan
6	- Perubahan anggaran di APBDP	DPA APBD – P
7	Penambahan personil pengawasan (jabatan fungsional pengawasan perikanan)	SK jabatan fungsional pengawasan perikanan

BAB VI PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Strategis OPD ini sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan risiko, yang menginformasikan proses-proses pengelolaan/penilaian risiko strategis OPD, mulai Identifikasi risiko, analisis risiko sampai penyusunan rencana tindak pengendalian.

Laporan ini merupakan bagian integral dari proses pengelolaan risiko yang akan menjadi sumber informasi bagi proses pengelolaan risiko lainnya oleh organ-organ dalam struktur pengelolaan risiko OPD. Bagi UPR Tingkat OPD, laporan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan tindak lanjut perbaikan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, mengelola informasi dan komunikasi serta pemantauan/monitoring rencana tindak pengendalian, memantau keterjadian risiko, serta dasar bagi pelaksanaan evaluasi berkala. Bagi Unit Kepatuhan, laporan ini menjadi instrumen untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan UPR Tingkat OPD dalam melaksanakan pengelolaan risiko.

Laporan ini bukanlah akhir dari suatu proses pengelolaan risiko, sehingga dituntut komitmen dari seluruh jajaran anggota UPR Tingkat OPD dan Organ pengelolaan risiko terkait untuk secara konsisten melakukan pengelolaan risiko secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP.

Tanjung Selor, Agustus 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. RAMBUTAN, GEDUNG GADIS LANTAI 3,
TANJUNG SELOR 77212

 **dkp.kaltara@gmail.com**

 **dkp.kaltara**

 **dkp kaltara**